

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemeriksaan perkara dalam persidangan dilakukan oleh suatu tim hakim yang berbentuk majelis. Majelis hakim tersebut paling sedikit terdiri dari tiga orang hakim, yakni seorang bertindak sebagai hakim ketua dan lainnya sebagai hakim anggota. Sidang majelis hakim yang memeriksa perkara itu dibantu oleh seorang panitera pengganti.

Majelis hakim dalam pemeriksaan sengketa perdata, harus benar-benar memahami perkara yang terjadi yang telah dibuktikan oleh para pihak. Hakim harus mempunyai kesimpulan terhadap pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Dengan kata lain bahwa kebenaran suatu peristiwa hanya dapat diperoleh melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak melalui pembuktian. Majelis hakim dapat memutuskan suatu perkara yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa yaitu pihak penggugat dan tergugat.

Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, maka gugatan akan ditolak. Sedangkan apabila berhasil gugatan akan dikabulkan. Tidak semua dalil-dalil yang disangkal atau diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, maka tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam soal pembuktian kedua belah pihak yang harus membuktikan dalilnya. Dalam praktek hukum acara pihak

penggugat yang harus terlebih dahulu membuktikan, dengan logika sebagai berikut: penggugat mengajukan dalil-dalil dan jika dalil-dalil tersebut disangkal oleh penggugat maka penggugat harus membuktikan kebenarannya. Demikian juga tergugat yang menyangkal, dia wajib membuktikan sangkalannya itu.

Selain untuk hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal masih terdapat satu lagi hal yang tidak harus dibuktikan, ialah berupa hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah sepenuhnya diketahui oleh khalayak ramai, hal ini dalam hukum acara perdata disebut fakta notoir.

Pasal 162 HIR yang mengatur tentang bukti dan tentang menerima atau menolak alat bukti dalam perkara perdata, hendaklah Pengadilan Negeri memperhatikan peraturan pokok yakni perintah kepada hakim untuk hal pembuktian harus berpokok pangkal kepada peraturan-peraturan yang terdapat dalam HIR yaitu pasal 163 dan seterusnya.

Dalam pasal 163 HIR yang berbunyi:

“Barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu”.

Dalam pasal tersebut terdapat asas: “Siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya”. Secara sepintas lalu, asas

tersebut “kelihatannya” sangat mudah. Akan tetapi dalam praktek terdapat hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat, siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Sebagai patokan dapat dikemukakan bahwa hendaklah tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus, menurut keadaan yang konkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan.¹

Guna membuktikan suatu peristiwa, maka ada beberapa cara yang perlu diperhatikan terhadap alat-alat bukti. Kebanyakan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta telah berlangsung pada masa lampau, sehingga ada kesulitan untuk diingat atau bahkan terlupakan sama sekali. Hal ini disebabkan orang tidak dapat menduga bahwa pada suatu waktu atau kemudian hari akan diungkapkan kembali atas peristiwa atau fakta tersebut, yang “notabene” telah dilupakan, atau orang tidak mengingat lagi, sehingga perlu adanya alat bukti yang cukup untuk dapat memberikan keterangan mengenai fakta atau peristiwa tersebut.

Dalam pembuktian dimuka Pengadilan Negeri, penekanan penggunaan alat bukti diletakkan pada alat bukti tertulis atau surat-surat. Menurut pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹ Retnowulan, Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, hal.5.

(KUH Perdata) atau pasal 164 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) atau pasal 283 Reglemen Daerah Seberang (RDS) dalam perkara perdata, terdiri atas alat bukti sebagai berikut:²

1. Alat bukti berupa surat-surat atau tulisan.
2. Alat bukti berupa saksi-saksi.
3. Alat bukti berupa persangkaan.
4. Alat bukti berupa pengakuan.
5. Alat bukti sumpah.

Selain kelima macam alat bukti diatas, masih ada alat bukti lain yang hanya diatur dalam HIR, yaitu:

1. Pemeriksaan ditempat.
2. Keterangan saksi ahli.

Dalam praktek masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering dipergunakan, ialah istilah “pengetahuan hakim”. Pengetahuan hakim adalah hal atau keadaan yang diketahuinya sendiri oleh hakim dalam sidang, misalnya hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat bahwa benar ada barang-barang penggugat yang dirusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakannya itu.³

Dari berbagai macam alat bukti tersebut, yang menarik dan sesuai yang berhubungan dengan skripsi penulis adalah alat bukti

² Subekti, 1985, *Hukum Pembuktian*, PT Paramita, Jakarta: hal.7.

³ *Ibid*, hal.54.

yang berupa surat. Yang dalam hal ini ketentuan alat bukti berupa surat dapat dilihat dalam pasal 137 HIR yang berbunyi:

“Kedua belah pihak boleh timbal balik menuntut melihat surat keterangan lawannya yang untuk maksud itu diserahkan kepada hakim”.

Pasal tersebut memungkinkan kepada kedua belah pihak terutama pihak tergugat untuk memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan alat bukti dalam perkara tersebut, terutama surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa yang untuk selanjutnya keputusan tersebut diserahkan kepada hakim, agar hakim dapat mengambil kesimpulan mengenai isi surat-surat tersebut. Surat dimaksud adalah surat-surat yang berhubungan dengan persoalan yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak.

Dalam praktek hukum acara perdata dibagi dalam tiga kelompok, atau tiga macam-macam surat, yakni:⁴

- a. Surat biasa.
- b. Akta Otentik.
- c. Akta Dibawah Tangan.

Perbedaan dari ketiga macam surat ini, yaitu dalam kelompok mana suatu tulisan termasuk itu tergantung dari cara pembuatannya. Sehelai surat biasa dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti. Apabila surat itu dijadikan bukti, hal ini mirip suatu kebetulan saja.

⁴ *Ibid*, hal. 57.

Dalam kelompok ini termasuk surat-surat cinta, surat-surat sehubungan dengan korespondensi dagang dan sebagainya.

Dalam pasal 165 HIR memuat suatu definisi apa yang dimaksud akta otentik, yaitu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu. Perkataan diperbuat seharusnya tidak tepat, seharusnya dibuat.⁵

Sedangkan jenis surat yang lain adalah akta dibawah tangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan akta dibawah tangan tangan adalah *“Akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan”*.⁶

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, cek dan bilyet giro yang masuk dalam kategori surat-surat berharga, sudah banyak dipergunakan dalam lalulintas perdagangan. Cek diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu dalam bab VII, dan bilyet giro pengaturannya terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI)

⁵ *Ibid*, hal.58.

⁶ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hal.123.

No.4/670/UPPB/PBB tanggal 24 Januari 1972 jo SK.Direktur BI No.28/KEP/DIR, tanggal 14 Juli 1995. Ketentuan Pasal 178 KUHD, dapat disimpulkan pengertian cek adalah sebagai berikut: surat cek adalah surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana perintah tanpa syarat kepada banker untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa ditempat tertentu.⁷

Pengertian bilyet giro menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.4/670/UPPB/PBB tanggal 24 Januari 1972 jo SK.Direktur BI No.28/KEP/DIR, tanggal 14 Juli 1995 adalah sebagai berikut: surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening pemegang yang disebutkan namanya.⁸

Sehubungan dengan pengertian cek dan bilyet giro tersebut, maka cek dan bilyet giro dapat dikategorikan sebagai akta dibawah tangan, karena cek dan bilyet giro hanya dibuat antara para pihak yang berkepentingan saja dan tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut, maka cek dan bilyet giro selain sebagai akta dibawah tangan juga dapat digunakan sebagai alat bukti.

⁷Joni Emerson, 2001, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, Palembang: hal.123.

⁸ *Ibid*, hal.150

Cek sebagai surat berharga mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalulintas perdagangan atau usaha. Berkaitan dengan hal tersebut, cek dan bilyet giro mempunyai tiga fungsi utama, yaitu:⁹

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang).
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjual-belikan dengan mudah dan sederhana).
3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).

Mengingat perkembangan teknologi yang sedemikian canggihnya, dimana orang lain ingin mendapatkan hal secara praktis maka cek dan bilyet giro sudah tidak asing lagi digunakan sebagai alat pembayaran. Dunia bisnis tidak dapat lepas begitu saja dari bidang hukum. Dalam melakukan perdagangan orang seringkali terbentur pada suatu masalah, dan menyelesaikannya melalui jalur pengadilan. Namun dalam perkembangannya, cek dan bilyet giro yang memiliki fungsi dibidang perdagangan ini juga dapat digunakan sebagai alat bukti diluar pengadilan.

Bedasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang mengambil judul: “PENGUNAAN CEK DAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA DALAM PERKARA HUTANG-PIUTANG (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

⁹ Abdul Kadir Muhammad, 1993, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga*, Bandung: Alumni, hal.17.

B. RUMUSAN MASALAH

Mengacu pada uraian latar belakang diatas dan memperhatikan alasan pemilihan judul, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian cek dan bilyet giro dalam proses pemeriksaan sengketa perdata dalam perkara hutang-piutang di Pengadilan Negeri Surakarta?.
2. Permasalahan apa yang timbul dan bagaimana cara mengatasinya berkaitan dengan digunakannya cek dan bilyet giro sebagai alat bukti khususnya dalam perkara perdata?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu tindakan untuk lebih mengetahui dan mendalami segala kehidupan yang belum diketahui, oleh sebab itu penelitian bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi atau keterangan-keterangan, sehingga kemudian yang penulis lakukan disini terbagi dalam:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian cek dan bilyet giro dalam proses pemeriksaan sengketa perdata dalam perkara hutang piutang, khususnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta.
 - b. Mengetahui permasalahan yang timbul dan cara mengatasinya, berkaitan dengan digunakannya cek dan bilyet

giro dalam proses pemeriksaan sengketa perdata dalam perkara hutang piutang di Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Tujuan Subyektif

- a. Memperoleh sebagai bahan penyusunan skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dibidang ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Mendalami, mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori yang penulis dapatkan di bangku perkuliahan pada kehidupan bermasyarakat.
- c. Untuk memperluas serta mengembangkan pemahaman terhadap aspek-aspek hukum, baik dalam teori maupun kenyataan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Tinggi rendahnya nilai dari suatu penelitian yang dilakukan selain ditentukan oleh metode penelitiannya juga ditentukan oleh manfaat atau kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum acara perdata, terutama yang berkaitan dengan penggunaan cek dan bilyet giro dalam proses pembuktian.

- b. Menjadi satu kontribusi dalam memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum pada khususnya

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan informasi, masukan dan penjelasan yang mendalam bagi masyarakat yang berkecimpung dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu mengenai peranan cek dan bilyet giro sebagai alat bukti dalam perkara hutang piutang.

E. METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara untuk meneliti suatu masalah dan merupakan cara untuk mengumpulkan data dari masalah yang akan diteliti agar dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Soerjono Soekanto mengemukakan pengertian penelitian, sebagai berikut:¹⁰

“Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan

¹⁰Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.3.

pemikiran pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal ini terutama disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah suatu proses, yakni suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis guna mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Dari definisi metodologi dan definisi penelitian diatas, maka dapat menjelaskan bahwa metodologi penelitian adalah suatu cara atau jawaban yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan.¹¹

Menurut Sutrisno Hadi penelitian berdasarkan tujuannya, seyogyanya dikaitkan dengan sifat dan fungsi penelitian itu sendiri, ia membagi menjadi tiga kelompok, yaitu:¹²

1. Penelitian yang bersifat eksploratif (menemukan), yaitu penelitian yang berarti menemukan masalah atau menemukan prospek sampai dengan menemukan akses, sistem, teori, atau dalil yang baru.

¹¹ Winarno Surakhmad, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, hal.5.

¹² Joko Purwono, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UNS Press, hal.50-51.

2. Penelitian yang bersifat development (mengembangkan), yaitu penelitian yang berarti mengembangkan apa yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat memperkaya dan makin memantapkan kedudukan bidang ilmu tertentu.
3. Penelitian yang bersifat Verifikatif (uji hipotesa), yaitu penelitian yang dapat digunakan untuk menguji asas-asas, sistem, teori, atau dalil yang baru tersebut.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Untuk dapat memperoleh suatu keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan suatu metodologi penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat kualitatif. Hal ini disebabkan bahwa proses pemeriksaan sengketa perdata dalam perkara hutang piutang lebih diartikan sebagai bentuk-bentuk aksiologis dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses Pengadilan Negeri, dalam hal ini keputusan hakim ketua pengadilan negeri Surakarta terhadap kekuatan pembuktian alat bukti berupa cek dan bilyet giro dalam perkara hutang piutang.

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini masuk dalam golongan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara jelas dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan alam atau gejala-gejala tertentu yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian cek dan bilyet giro sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan sengketa perdata dengan tidak menutup kemungkinan dalam tahap tertentu juga mengeksplanasikan atau memahami tentang hal yang terkait dengan obyek yang diteliti di Pengadilan Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, penulis memilih lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta dengan alasan di wilayah tersebut dikenal ramai dengan lalu lintas perdagangannya, yang mana penggunaan alat pembayaran yang mudah dan praktis seperti cek dan bilyet giro sering digunakan sebagai alat transaksi perdagangan ataupun bisnis lainnya.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Merupakan keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan atau dari lokasi penelitian. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim-hakim Pengadilan Negeri

Surakarta yang pernah menangani sengketa perdata dengan menggunakan cek dan bilyet giro sebagai alat buktinya.

b. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang tidak secara langsung diperoleh dari lokasi penelitian melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dimaksudkan untuk memperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan. Data sekunder ini dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, data arsip dan dokumen yang berhubungan dengan materi pembahasan.

5. Sumber Data

Sumber data adalah asal dari mana data yang diperoleh. Disini penulis menggunakan sumber data yang terbagi dalam dua jenis yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hakim-hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang secara langsung pernah memeriksa perkara cek dan bilyet giro sebagai alat bukti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan kekurangan yang

bersifat mendukung sumber data primer, antara lain buku-buku, dokumen, arsip-arsip dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan tehnik sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan cara pengumpulan data dalam penelitian dengan mengadakan tanya jawab secara bebas dengan hakim-hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang secara langsung pernah memeriksa perkara dengan cek dan bilyet giro sebagai alat buktinya, untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang bersifat lebih mendalam yang berhubungan dalam penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, menginventarisir, dan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, yang berlaku terkait dengan masalah yang diteliti.

7. Metode Analisis Data

Setelah data selesai terkumpul dengan lengkap, tahap yang harus dilakukan selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Teknik analisa data ada dua macam yaitu:

- a. Analisa data kualitatif
- b. Analisa data kuantitatif

Berdasarkan dua teknik analisa data tersebut, maka penelitian yang penulis lakukan menggunakan data kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama akan dilakukan pemrosesan dan penyusunan data dalam satu-satuan tertentu. Langkah ini akan dilanjutkan dengan pengkategorisasian data, dengan maksud menunjukkan kategori-kategori yang terpenting dan bagaimana kategori-kategori itu saling dihubungkan, beserta sifat-sifatnya. Kegiatan ini disertai dengan pembuatan coding.

Data-data yang telah dikategorisasikan, untuk selanjutnya akan dianalisis dengan metode analisis komparatif. Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan dengan jalan:

Pertama, membandingkan data dari hasil studi pustaka dengan data hasil wawancara. Kedua, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Setelah semua data analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data disisi yang lain. Dengan melalui cara-cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan di masyarakat.

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Penulisan skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, yang antara bab demi bab saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
- C. Tinjauan Pustaka

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan
2. Jenis Penelitian
3. Lokasi Penelitian
4. Jenis Data
5. Metode Pengumpulan Data
6. Metode Analisis Data

F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang menjadi dasar pembahasan dalam bab-bab berikutnya. Tinjauan pustaka ini membahas tentang:

A. Pengertian Cek dan Bilyet Giro Sebagai Surat Berharga

1. Pengertian Surat Berharga
 - a. Pengertian Cek
 - b. Pengertian Bilyet Giro
2. Tanggungjawab dan Kewajiban Penerbit Cek dan Bilyet Giro
 - a. Tanggungjawab dan Kewajiban Penerbit Cek
 - b. Tanggungjawab dan Kewajiban Penerbit Bilyet Giro

3. Syarat-syarat Formil Cek dan Bilyet Giro
 - a. Syarat-syarat Formil Cek
 - b. Syarat-syarat Formil Bilyet Giro
 4. Bentuk-bentuk Cek dan Bilyet Giro
 - a. Bentuk-bentuk Cek
 - b. Bentuk-bentuk Bilyet Giro
 5. Peraturan tentang Cek dan Bilyet Giro dalam Dunia Bisnis
 - a. Peraturan Tentang Cek
 - b. Peraturan Tentang Bilyet Giro
- B. Tentang Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata Dalam Persidangan
1. Kekuasaan Mutlak dan Relatif Pengadilan dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata dalam Persidangan
 2. Usaha Hakim dalam Mendamaikan Kedua Belah Pihak yang Bersengketa
 3. Pemeriksaan Kelengkapan Surat Gugatan
 - a. Syarat Formal
 - b. Syarat Substansial
- C. Pembuktian
1. Pengertian Pembuktian
 2. Pengertian Beban Pembuktian

3. Mengenai Pembebanan Pembuktian
4. Macam-macam Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata
 - a. Alat Bukti Surat
 - b. Alat Bukti Saksi
 - c. Alat Bukti Persangkaan
 - d. Alat Bukti Pengakuan
 - e. Alat Bukti Sumpah
5. Peran Cek dan Bilyet Giro sebagai Alat Bukti

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai:

- A. Kekuatan pembuktian cek dan bilyet giro dalam proses pemeriksaan sengketa perdata
- B. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dan cara mengatasinya, berkaitan dengan dipergunakannya cek dan bilyet giro sebagai alat bukti tersebut

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya disertai saran-saran yang dianggap perlu.